



LAPORAN KINERJA

INTERIM TRIWULAN II

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Badan Gizi Nasional (BGN) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Januari hingga Maret 2025, sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja triwulanan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-based management*).

Laporan ini menyajikan perkembangan capaian indikator kinerja utama dan kegiatan prioritas, disertai dengan analisis terhadap realisasi anggaran, tantangan operasional, serta langkah-langkah tindak lanjut yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan untuk menjadi alat pemantauan internal dan dasar perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program strategis Badan Gizi Nasional.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dan kerja sama seluruh unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional serta sinergi dengan mitra lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan konstruktif dari seluruh unit di lingkungan Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan kualitas laporan dan efektivitas pelaksanaan program ke depan.

Jakarta, Juli 2025

Dadan Hindayana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
C. Mandat dan Peran Strategis	9
D. Potensi dan Permasalahan	10
E. Sistematika Penyajian Laporan	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
A. Rencana Strategis	27
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Capaian Kinerja Organisasi	42
B. Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Permasalahan dan Saran	53
LAMPIRAN	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja, Badan Gizi Nasional (BGN) menyusun Laporan Kinerja Interim TW II Tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja Interim BGN TW II Tahun 2025 ini juga disusun sebagai sarana evaluasi perbaikan atas kinerja yang telah dilaksanakan pada periode berikutnya. Realisasi kinerja BGN terhadap TW II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
SS 1: Terwujudnya Sistem dan Tata Kelola pemenuhan gizi nasional yang efektif (mekanisme, prosedur, dan standar tata kelola pemenuhan gizi)	IKSS 1.1: Persentase pemenuhan kebijakan/peraturan/pedoman di bidang pemenuhan gizi nasional	16,13	16,13	100
	IKSS 1.2: Jumlah kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional yang diterapkan	1	1	100
	IKSS 1.3: Persentase komplain yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A
SS 2: Terwujudnya penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif	IKSS 2.1 Persentase siswa/santri yang mendapatkan makan bergizi gratis	24	12,18	0,51
	IKSS 2.2: Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mendapatkan makan bergizi gratis	11	1,25	0,11
	IKSS 2.3: Persentase kenaikan status gizi penerima manfaat program makan bergizi gratis	5	1,33	0,27

Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
SS 3: Terwujudnya literasi gizi masyarakat tentang makan bergizi secara optimal	IKSS 3.1: Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik	25	12,18	48,72
	IKSS 3.2: Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik	25	1,25	5,00
SS 4: Terwujudnya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional	IKSS 4.1: Persentase kerjasama di bidang pemenuhan gizi nasional yang efektif	85	0	0
	IKSS 4.2: Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemenuhan gizi nasional	80	0	0
SS 5: Terwujudnya satuan pelayanan pemenuhan gizi sesuai standar	IKSS 5.1: Persentase SPPG satuan pelayanan (dapur) yang sesuai standar	95	23,09	24,31
SS 6: Terwujudnya tata kelola dan pemerintahan Badan Gizi Nasional yang optimal	IKSS 6.1: Indeks RB BGN	N/A	N/A	N/A

Ketidaktercapaian beberapa indikator yang telah diukur pada TW disebabkan oleh: (1) kurangnya SDM, (2) informasi pendaftaran untuk menjadi mitra sulit, (3) jumlah SPPG belum sesuai target, (4) data belum tersedia/diisi berdasarkan Fa Detail realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional, (5) belum tersedianya sistem pemantauan dan pengawasan yang terintegrasi, (6) petunjuk teknis (juknis) pemantauan dan pengawasan yang masih dalam proses penyusunan.

Dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025, Badan Gizi Nasional berhasil merealisasikan anggaran sebanyak Rp 5.004.725.395.450 atau sebesar 7,05% dari total anggaran yang dialokasikan yakni sebesar Rp 71.000.000.000.000. Kinerja Badan Gizi Nasional diharapkan terus meningkat pada periode yang akan datang. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumsi makanan bergizi merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Makanan yang bergizi memiliki dampak langsung terhadap tumbuh kembang individu, terutama pada anak-anak, serta berperan penting dalam pencegahan berbagai masalah kesehatan, seperti stunting, obesitas, dan penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes dan hipertensi. Di Indonesia, meskipun berbagai program kesehatan telah dilaksanakan, masih terdapat tantangan besar terkait pola makan yang tidak seimbang, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi.

Menyadari pentingnya peran gizi dalam pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 menetapkan pembentukan Badan Gizi Nasional. Badan ini dibentuk sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas khusus untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dengan tata kelola yang baik. Pembentukan Badan Gizi Nasional ini merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar lembaga dan memastikan implementasi kebijakan gizi yang lebih efektif di seluruh lapisan masyarakat.

Melihat pentingnya pemenuhan gizi dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan status gizi yang optimal bagi seluruh penduduknya. Berbagai permasalahan seperti stunting, wasting, dan obesitas pada anak-anak menjadi isu yang perlu diatasi secara menyeluruh. Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang paling serius di Indonesia, terutama pada kelompok balita. Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan sejak 2013, penurunan tersebut mengalami stagnasi pada tahun 2023, dengan prevalensi stunting tetap di angka 21,5% (melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO). Secara global, prevalensi stunting pada tahun 2022 mencapai 22,3%, yang berarti sekitar 148,1 juta balita di dunia mengalami stunting. Indonesia diperkirakan menyumbang 4,7% dari seluruh kasus stunting di dunia pada tahun 2022. Walaupun prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam menurunkan angka stunting sejak 2013, dari 37,6% menjadi 21,6% pada 2022. Penurunan rata-rata sekitar 1,55% per tahun ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam

mengurangi masalah gizi kronis. Namun, meskipun tren ini positif, target RPJMN 2020-2024 untuk menurunkan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 tampak sulit dicapai, mengingat penurunan yang stagnan dalam dua tahun terakhir (dari 21,6% pada 2022 menjadi 21,5% pada 2023).

Wasting merujuk pada kondisi ketika berat badan anak berada di bawah standar yang sesuai untuk tinggi badannya, yang sering kali disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka pendek atau infeksi yang berulang. Malnutrisi akut, khususnya malnutrisi akut berat, terjadi ketika anak mengalami penurunan berat badan yang drastis dan mendadak karena kurangnya asupan gizi yang cukup. Berdasarkan data dari Riskesdas 2018, prevalensi wasting pada anak-anak balita di Indonesia mencapai 10.2%, yang mengalami penurunan dari 12.1% pada tahun 2013. Selanjutnya, data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa pada tahun 2019, prevalensi wasting turun menjadi 7.4%, dan lebih lanjut menurun menjadi 7.1% pada tahun 2021. Namun, angka tersebut kembali meningkat menjadi 7.7% pada tahun 2022, dan data terbaru dari SKI 2023 menunjukkan bahwa prevalensi wasting kembali naik ke 8.5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah ini belum terselesaikan sepenuhnya dan masih memerlukan perhatian yang serius. Untuk menurunkan angka wasting, Indonesia telah meluncurkan berbagai program intervensi gizi, seperti pemberian makanan tambahan untuk anak-anak yang teridentifikasi mengalami malnutrisi akut dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Selain itu, kebijakan terkait peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun (1.000 hari pertama kehidupan), sangat penting dalam mencegah dan menangani masalah wasting.

Obesitas kini menjadi salah satu masalah gizi yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Data dari SSGI 2022 menunjukkan bahwa sekitar 64.4% anak usia 5-12 tahun mengalami kekurangan aktivitas fisik, yang sejalan dengan prevalensi obesitas yang mencapai 20% di kelompok usia ini (gabungan antara anak yang gemuk dan obesitas). Obesitas pada anak terjadi ketika berat badan mereka melebihi batas ideal untuk usianya, yang umumnya disebabkan oleh kelebihan asupan energi dan kurangnya aktivitas fisik. Beberapa faktor utama penyebabnya termasuk pola makan yang tidak sehat, seperti tingginya konsumsi makanan manis, makanan instan, dan makanan cepat saji, yang semakin marak di daerah perkotaan. Akses terhadap makanan sehat, terutama di kantin sekolah, perlu diperkuat dengan pengawasan ketat terhadap iklan makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Selain itu, skrining gizi rutin di sekolah harus diperkuat agar intervensi dini dapat dilakukan kepada anak-anak yang berisiko mengalami obesitas.

Dengan pemantauan berkala, anak-anak yang membutuhkan dapat segera menerima bantuan gizi yang tepat.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional memiliki fungsi yang meliputi koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di berbagai bidang terkait gizi, termasuk sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerjasama, serta pemantauan dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini mencerminkan pendekatan komprehensif yang diperlukan untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari sektor publik maupun swasta. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi prevalensi kekurangan gizi, stunting, serta masalah gizi lainnya yang berhubungan dengan pola makan yang kurang seimbang dan pengetahuan gizi yang terbatas.

B. Tujuan, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tujuan Organisasi

Tujuan BGN menggambarkan arah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Gizi Nasional dalam rangka meningkatkan status gizi masyarakat secara nasional. Setiap tujuan berfokus pada pencapaian hasil yang konkret dan berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya akses, edukasi, tata kelola, kerja sama, dan keberlanjutan dalam pemenuhan makanan bergizi.

Tujuan 1: Terwujudnya Peningkatan Status dan Akses Gizi Masyarakat secara Nasional

Terwujudnya peningkatan status dan akses gizi masyarakat secara nasional ditandai dengan tercapainya pemenuhan makanan bergizi secara merata, aman, dan berkualitas tinggi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak usia sekolah. Peningkatan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) secara konsisten dan terukur, dengan intervensi langsung yang tepat sasaran serta pemantauan rutin terhadap kualitas layanan. Evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas program dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini akan menciptakan landasan kuat dalam membentuk generasi sehat, cerdas, dan produktif yang mampu mendukung kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Indikator Tujuan:

- a. Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U dengan target sebesar 75,67 di 2029 (RPJMN 2025-2029).
- b. Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB dengan target sebesar 90,1 di 2029 (RPJMN 2025-2029).

Tujuan 2: Terwujudnya tata kelola organisasi Badan Gizi Nasional yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas

Tujuan ini mengedepankan penguatan kelembagaan dan tata kelola internal BGN agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Tata kelola yang transparan, akuntabel, profesional, serta berintegritas tinggi menjadi prioritas utama, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan berbagai program gizi. Dengan tata kelola yang optimal, diharapkan seluruh program dan intervensi gizi yang dilaksanakan mampu memberikan hasil nyata yang berdampak signifikan bagi peningkatan status gizi masyarakat secara nasional.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, BGN berkomitmen untuk meningkatkan status gizi nasional melalui pendekatan yang menyeluruh, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, guna menciptakan generasi yang sehat, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Indikator Tujuan: Indeks Kematangan Tata Kelola Organisasi dengan target sebesar 4 di Tahun 2029.

2. Fungsi Organisasi

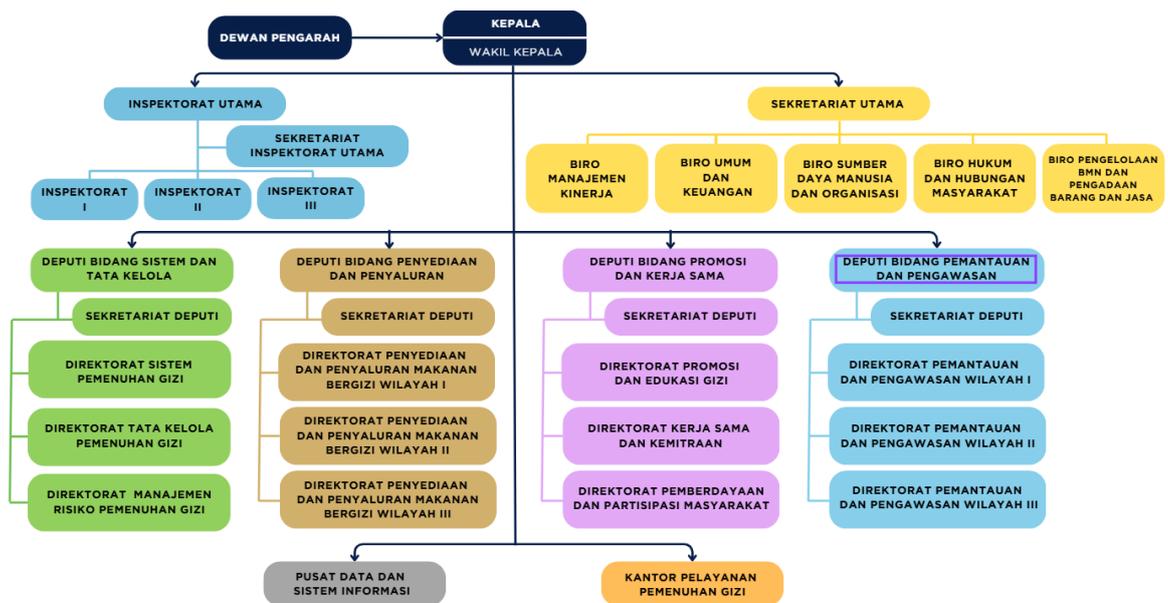
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan badan gizi nasional;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab badan gizi nasional;

- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan badan gizi nasional;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan badan gizi nasional; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, organisasi BGN terdiri dari Depan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Inspektorat Utama, Sekretariat Utama, dan 4 (empat) Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BGN ditetapkan dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BGN sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BGN

Pimpinan BGN

a. Dewan Pengarah

Bertugas memberikan arahan strategis kepada pelaksana BGN dalam menyelenggarakan pemenuhan gizi nasional. Dewan Pengarah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, dan 5 (lima) orang anggota yang berasal dari berbagai latar belakang seperti tokoh kenegaraan, agama, masyarakat, serta akademisi.

b. Kepala dan Wakil Kepala BGN

Kepala BGN bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BGN dengan memperhatikan arahan dari Ketua Dewan Pengarah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala dibantu oleh Wakil Kepala untuk perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas BGN, baik di lingkungan kantor pusat maupun unit pelaksana teknis

Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama

a. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BGN. Sekretariat Utama berfungsi untuk:

- 1) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BGN;
- 2) koordinasi kegiatan di lingkungan BGN;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BGN;
- 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sekretariat Utama terdiri dari beberapa Biro, seperti Biro Manajemen Kinerja, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa.

b. Inspektorat Utama

Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal terhadap kinerja di lingkungan BGN melalui audit, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya guna memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BGN;
- 2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BGN terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan BGN;
- 5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Utama terdiri atas kelompok jabatan fungsional, yaitu Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III.

Deputi-Deputi dan Fungsinya

a. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola

Mengelola perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional. Deputi ini bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan sistem pengelolaan pemenuhan gizi.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola terdiri atas beberapa Direktorat, yaitu Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi, Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi, dan Direktorat Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi.

b. Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran pemenuhan gizi nasional. Deputi ini akan memastikan distribusi makanan yang aman dan bergizi bagi masyarakat, dengan fokus pada pelaksanaan di berbagai wilayah.

Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran terdiri atas Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I, Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, dan Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III.

c. Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama

Bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerja sama pemenuhan gizi nasional. Deputi ini berfungsi untuk berkoordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan di bidang promosi dan kerja sama pemenuhan gizi nasional.

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama terdiri atas Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan, dan Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.

d. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan

Bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Deputi ini berfungsi

memantau dan mengevaluasi kebijakan serta program pemenuhan gizi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan di lapangan.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan terdiri atas Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, dan Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III.

Pusat Data dan Sistem Informasi

Berperan dalam pengelolaan data gizi nasional yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta pemantauan status gizi masyarakat. Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi di bidang pemenuhan gizi nasional. Fungsi yang diselenggarakan antara lain Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi; Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi; dan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi.

Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan Dukungan Teknis

a. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG)

KPPG merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan BGN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran. KPPG bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi. Terdiri atas Balai Pelayanan Makanan Bergizi dan Satuan Pelayanan Makanan Bergizi yang berfungsi sebagai unit operasional untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat.

Fungsi dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi antara lain:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) pelaksanaan layanan penyediaan makanan bergizi;
- 3) pelaksanaan layanan distribusi makanan bergizi;
- 4) pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- 5) pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- 6) penyusunan evaluasi dan pelaporan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional, pengembangan kebijakan, dan pengelolaan data yang melibatkan tenaga profesional sesuai kebutuhan.

C. Mandat dan Peran Strategis

Badan Gizi Nasional (BGN) dibentuk sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Mandat utama BGN adalah melaksanakan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dengan tata kelola yang baik. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memiliki akses terhadap makanan bergizi dan bahwa kebijakan terkait gizi dapat diterapkan secara efektif di tingkat masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Arah Kebijakan Strategis Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Teknis:

- a. Mengembangkan dan menetapkan kebijakan di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional.
- b. Memastikan ketersediaan dan penyaluran gizi yang memadai bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan promosi dan kerja sama lintas sektor untuk mendukung program gizi.
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program gizi nasional.

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis:

Mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

3. Koordinasi dan Pembinaan Internal:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.
- b. Memberikan dukungan administrasi dan pembinaan untuk memastikan efektivitas operasional.

4. Pengelolaan Sumber Daya:

Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional dengan efisien dan transparan.

5. Pengawasan dan Evaluasi:

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional untuk memastikan kepatuhan dan kualitas program.

Badan Gizi Nasional memfokuskan program pemenuhan gizi pada kelompok-kelompok berikut:

- a) Peserta Didik: Anak-anak pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, termasuk di lingkungan pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, khusus, layanan khusus, dan pesantren.
- b) Anak Usia di Bawah Lima Tahun: Memastikan balita mendapatkan asupan gizi yang optimal.
- c) Ibu Hamil dan Menyusui: Memberikan dukungan gizi untuk kesehatan ibu dan perkembangan anak.

Melalui arah kebijakan strategi dan fokus sasaran tersebut, BGN berkomitmen untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera melalui pemenuhan gizi yang optimal, berkontribusi pada pembangunan SDM yang lebih sehat dan produktif.

D. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka melaksanakan mandatnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas peningkatan gizi nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) dihadapkan pada sejumlah tantangan dan peluang yang perlu dianalisis secara mendalam. Untuk mencapai tujuan strategis sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJMN, penting bagi BGN untuk memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerjanya. Melalui analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), BGN dapat mengidentifikasi secara sistematis kekuatan yang dapat dimaksimalkan, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang perlu diantisipasi. Pendekatan ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi institusi dan permasalahan yang harus dihadapi, sehingga memungkinkan BGN untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan terarah dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat serta pencapaian target pembangunan nasional.

1. **Strength (Kekuatan)**

Sebagai Lembaga yang baru dibentuk, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki sejumlah kekuatan yang berperan penting dalam memperkuat posisi dan kinerjanya. Kekuatan-kekuatan ini memungkinkan BGN untuk berfungsi lebih efektif dalam menangani masalah gizi di Indonesia serta mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan dasar yang kuat, BGN mampu menjalankan tugas-tugasnya secara optimal melalui strategi yang didukung oleh keunggulan organisasi. Hal ini memungkinkan BGN memainkan peran signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional yang terkait dengan gizi dan kesehatan secara lebih luas. Berikut beberapa potensi kekuatan yang dimiliki oleh BGN:

a. Dukungan Pemerintah Pusat dan Regulasi yang Kuat

BGN lahir dengan mandat kuat dari pemerintah pusat dan didukung oleh regulasi resmi, seperti dalam RPJMN dan undang-undang terkait gizi nasional. Hal ini memberi otoritas penuh kepada BGN dalam menjalankan program gizi serta mewujudkan kebijakan yang diatur secara legal dan politis, memastikan bahwa prioritas gizi nasional menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.

b. Mandat yang Jelas dalam Peningkatan Gizi Nasional

Sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani masalah gizi, BGN memiliki mandat yang jelas dan fokus spesifik untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Dengan fokus yang tidak terpecah pada tugas-tugas lain, BGN dapat merancang program-program gizi dengan target yang jelas dan terukur, memastikan peningkatan kualitas SDM melalui intervensi gizi yang tepat.

c. Dukungan Global dan Bukti Awal

Indonesia mendapat pengakuan internasional dengan tergabung dalam School Meals Coalition (100+ negara) untuk program makanan sekolah. Hal ini membuka akses ke praktik terbaik global. Uji coba MBG di lapangan pun menunjukkan hasil positif: di salah satu daerah percontohan, angka kehadiran siswa naik dari ~60–70% menjadi 99% dan anak-anak lebih aktif serta sehat.

d. Jaringan Kelembagaan Lokal yang Siap Dimanfaatkan

Meskipun BGN adalah lembaga baru, lembaga ini memiliki akses ke jaringan kelembagaan lokal seperti lembaga Pendidikan, pesantren, dan puskesmas yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Infrastruktur ini memungkinkan pelaksanaan program gizi dengan cakupan yang luas, menjangkau masyarakat bahkan di daerah terpencil.

- e. **Kemitraan dengan Organisasi Internasional**

Potensi besar untuk menjalin kemitraan dengan organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, dan FAO memperkuat posisi BGN. Melalui dukungan dari lembaga-lembaga internasional ini, BGN bisa mendapatkan bantuan teknis, pendanaan, dan akses pada praktik terbaik global dalam upaya meningkatkan status gizi di Indonesia, sehingga menambah legitimasi program-program yang dijalankan.
- f. **Penggunaan Teknologi Digital dan Inovasi**

Sebagai lembaga baru, BGN memiliki peluang besar untuk membangun sistem inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan status gizi, pengelolaan data, serta komunikasi publik. Platform digital ini memungkinkan pemantauan secara real-time dan analisis data yang lebih cepat, sehingga BGN dapat merespons masalah gizi secara lebih efisien.
- g. **Momentum Global terhadap Masalah Gizi**

Pembentukan BGN sejalan dengan peningkatan perhatian global terhadap masalah gizi, terutama dalam konteks peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Peningkatan perhatian ini memberi momentum yang tepat bagi BGN untuk memperkuat program-program gizi di Indonesia, selaras dengan prioritas global, dan mempercepat implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan status gizi masyarakat.
- h. **Kesempatan untuk Membangun Budaya Organisasi yang Efektif**

Sebagai lembaga baru, BGN memiliki peluang besar untuk membangun budaya organisasi yang kuat dan inovatif sejak awal. Fokus pada kolaborasi, efisiensi, dan inovasi akan membantu membentuk tim yang solid, berorientasi pada solusi, dan mampu menjalankan program dengan optimal, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang produktif.
- i. **Kolaborasi Lintas Sektor yang Kuat**

BGN memiliki kesempatan untuk membangun sinergi lintas sektor yang lebih kuat dengan kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial serta sektor BUMN dan swasta. Pendekatan multisektoral ini memungkinkan program gizi yang lebih holistik dan terintegrasi, menangani masalah gizi dari berbagai aspek seperti ketahanan pangan, pendidikan gizi, dan layanan kesehatan.
- j. **Fortifikasi Pangan sebagai Prioritas**

BGN memiliki potensi besar dalam memimpin program fortifikasi pangan, dengan fokus pada pengayaan bahan pokok seperti beras, tepung, dan minyak goreng

dengan mikronutrien penting seperti zat besi, yodium, dan vitamin A. Fortifikasi ini membantu mengatasi kekurangan gizi mikro yang menjadi masalah signifikan di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil.

k. **Pengalaman Manajemen Gizi dari Program Nasional**

Meskipun baru, BGN dapat memanfaatkan pengalaman manajemen program gizi dari berbagai inisiatif nasional yang telah ada, seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Isi Piringku dan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah. Pengalaman ini memberikan pemahaman terhadap tantangan di lapangan, sehingga memungkinkan BGN merancang program gizi yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

l. **Dukungan Finansial dan Kebijakan yang Tepat**

Dengan posisi strategisnya, BGN memiliki akses pada anggaran pemerintah yang difokuskan untuk peningkatan gizi, terutama pada anak sekolah di tingkat pra sekolah, dasar dan menengah. Selain itu, kebijakan yang mendukung peningkatan gizi nasional memberi peluang bagi BGN untuk menjalankan program dengan dukungan penuh dari pemerintah, memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target pembangunan nasional.

Dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, Badan Gizi Nasional (BGN) dapat memainkan peran strategis dalam mempercepat peningkatan status gizi nasional, membangun sistem yang inovatif, serta memaksimalkan dukungan dari berbagai sektor, baik nasional maupun internasional. Potensi besar ini memberi BGN kemampuan untuk tidak hanya memperbaiki status gizi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat, produktif, berdaya saing dan berkualitas.

2. Weakness (Kelemahan)

a. **Keterbatasan Pengalaman Operasional**

Sebagai lembaga yang baru berdiri pada akhir 2024, BGN memiliki keterbatasan dalam pengalaman operasional, khususnya terkait manajemen program gizi berskala nasional. Keterbatasan ini berpotensi mempengaruhi efektivitas serta efisiensi implementasi program di tahap awal operasional lembaga.

b. **Struktur Organisasi yang Masih dalam Tahap Pengembangan**

BGN masih dalam proses pengembangan struktur organisasi yang solid dan efektif. Kondisi ini menyebabkan koordinasi antarunit belum optimal, memperlambat proses pengambilan keputusan, serta dapat menghambat kelancaran implementasi program di lapangan.

- c. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Terbatas

Kapasitas SDM, khususnya tenaga kerja profesional di bidang gizi dan kesehatan masyarakat, masih sangat terbatas. Minimnya pelatihan khusus mengenai edukasi gizi bagi tenaga pengajar di sekolah memperparah kondisi ini, sehingga efektivitas edukasi gizi secara nasional belum maksimal.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai lembaga baru, perekrutan dan pelatihan sumber daya manusia, terutama di tingkat lokal, belum memadai untuk mendukung pelaksanaan program gizi secara menyeluruh di berbagai daerah. SDM yang terampil dan berpengalaman dalam bidang gizi dan kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan, namun di beberapa daerah terpencil, kapasitas tenaga kerja masih jauh dari memadai.
- d. Infrastruktur Distribusi yang Terbatas

Distribusi logistik makanan bergizi menghadapi tantangan besar akibat infrastruktur transportasi yang terbatas, terutama di luar Jawa dan daerah terpencil. Kesulitan geografis ini dapat menyebabkan keterlambatan distribusi, mengurangi efektivitas program, serta memperbesar risiko ketidakmerataan cakupan sasaran.
- e. Sistem Pengawasan dan Pemantauan Belum Optimal

BGN belum sepenuhnya memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi secara matang, menyebabkan kendala dalam mengukur efektivitas program secara konsisten. Kondisi ini dapat menghambat pengendalian kualitas serta efektivitas program di berbagai wilayah.
- f. Ketergantungan Tinggi pada Dukungan Kementerian dan Lembaga Lain

Karena kapasitas internal masih terbatas, BGN sangat bergantung pada dukungan teknis, logistik, serta operasional dari kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Ketergantungan ini berisiko menciptakan tantangan koordinasi dan dapat memperlambat respon program di lapangan.
- g. Infrastruktur Teknologi yang Belum Memadai

BGN menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan dalam digitalisasi, seperti sistem informasi terintegrasi dan platform pemantauan real-time. Hal ini menyulitkan lembaga dalam pengambilan keputusan yang berbasis data, pelaporan transparan, serta pengelolaan program secara efisien.
- h. Kebutuhan Waktu untuk Pembentukan Jaringan dan Kemitraan

Sebagai lembaga baru, BGN memerlukan waktu yang cukup untuk membangun jaringan kerja sama yang kuat dengan organisasi internasional, sektor swasta, BUMN, maupun masyarakat sipil. Proses membangun kemitraan strategis ini

membutuhkan upaya intensif, yang jika tidak segera diatasi, dapat memperlambat efektivitas pelaksanaan program, khususnya terkait pendanaan, transfer pengetahuan, serta dukungan teknis di tahap awal operasional lembaga.

i. Ketidakmerataan Distribusi Program

Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur menyebabkan ketidakmerataan distribusi program di daerah terpencil, kepulauan, maupun pedesaan. Hal ini menimbulkan risiko bahwa daerah yang paling membutuhkan justru kurang optimal terjangkau oleh program-program gizi BGN.

j. Kurangnya Kesadaran Publik tentang Peran BGN

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran, fungsi, dan mandat BGN dalam meningkatkan gizi nasional menjadi tantangan tersendiri. Minimnya sosialisasi dapat mengurangi partisipasi publik serta dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan lembaga secara maksimal.

k. Risiko Tata Kelola dan Manajemen Anggaran

Besarnya anggaran yang dikelola BGN (Rp71 triliun pada 2025) menghadirkan risiko serius dalam aspek tata kelola keuangan. Tanpa pengalaman sebelumnya dalam pengelolaan dana besar, lembaga ini berisiko menghadapi inefisiensi, kesalahan administratif, serta tantangan logistik, terutama pada tahap awal implementasi.

l. Efektivitas Koordinasi Lintas Sektor Belum Optimal

Koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih membutuhkan penyempurnaan. Mekanisme kerja sama antar-sektor yang masih dalam tahap penyesuaian ini menyebabkan tantangan serius terhadap sinergi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program gizi nasional.

Meskipun BGN memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam peningkatan gizi nasional, berbagai kelemahan struktural dan operasional yang ada harus menjadi perhatian utama. Jika tidak ditangani dengan baik, kelemahan-kelemahan ini dapat menghambat efektivitas program yang direncanakan dan memperlambat pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memperkuat kapasitas internal, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang ada. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, BGN dapat memaksimalkan perannya sebagai lembaga kunci dalam mewujudkan peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia.

3. *Opportunity* (Peluang)

Sebagai lembaga yang baru dibentuk dengan mandat untuk meningkatkan status gizi masyarakat, Badan Gizi Nasional (BGN) berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada dalam mencapai tujuannya. BGN dihadapkan pada lingkungan yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang membuka jalan bagi terciptanya kolaborasi dan inovasi di berbagai bidang. Terdapat beberapa peluang yang memberikan ruang bagi BGN untuk memperkuat pelaksanaan program gizi dan memperluas dampaknya. Peluang-peluang ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional dan Regulasi Pendukung

Peningkatan gizi dan penurunan stunting merupakan prioritas RPJMN 2025–2029, dengan target prevalensi stunting turun hingga ~14% di 2029. Program MBG digagas Presiden sebagai strategi unggulan percepatan penurunan stunting, didukung payung hukum dan kebijakan lintas sektor. Lingkungan kebijakan ini memberikan dukungan kuat bagi BGN menjalankan program.

b. Kolaborasi dengan Organisasi Internasional

BGN dapat menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, FAO, dan WFP. Organisasi-organisasi ini menawarkan dukungan teknis, pendanaan, serta berbagi praktik terbaik dari berbagai negara dalam menangani masalah gizi. Kerja sama ini juga memperluas akses BGN terhadap sumber daya global untuk memperkuat program gizi di Indonesia.

c. Partisipasi BUMN dan Swasta Melalui CSR

BGN dapat memanfaatkan potensi kolaborasi dengan BUMN dan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Banyak BUMN dan perusahaan swasta yang memiliki program sosial berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini dapat digunakan untuk memperluas distribusi makanan bergizi, mengedukasi masyarakat tentang pola makan sehat, serta mendukung inovasi produk pangan yang bergizi dan terjangkau bagi masyarakat luas.

d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Gaya Hidup Sehat

Tren gaya hidup sehat yang semakin populer di Indonesia memberikan peluang bagi BGN untuk memperkuat program edukasi gizi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola makan seimbang dan gaya hidup aktif merupakan peluang strategis untuk mempercepat perubahan perilaku gizi di tingkat individu dan keluarga. Melalui kampanye publik dan edukasi yang tepat, BGN dapat mendorong masyarakat untuk mengadopsi kebiasaan makan yang lebih sehat.

e. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pemantauan Gizi

Perkembangan teknologi digital memberi peluang bagi BGN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan data, pemantauan program, dan pelaporan. BGN dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan sistem pemantauan gizi yang real-time dan berbasis data, sehingga dapat merespons masalah gizi dengan cepat. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi gizi melalui media digital dan aplikasi kesehatan.

f. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan

BGN dapat menjalin kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan, mulai dari tingkat pra sekolah, dasar hingga menengah, untuk memperkenalkan program gizi yang berkelanjutan. Program edukasi gizi di sekolah dapat memberikan dampak jangka panjang dalam membentuk kebiasaan makan sehat pada anak-anak dan remaja, yang penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka. Selain itu, sekolah juga dapat menjadi sarana distribusi makanan bergizi bagi siswa.

g. Dukungan Pendanaan dari Hibah dan Bantuan Internasional

BGN memiliki peluang untuk memperoleh pendanaan dari lembaga donor internasional yang berfokus pada peningkatan gizi masyarakat. Bantuan dari lembaga donor dapat digunakan untuk memperkuat program-program yang telah direncanakan, terutama di daerah-daerah dengan masalah gizi yang akut. Pendanaan internasional ini juga dapat mempercepat pencapaian target gizi nasional melalui intervensi yang lebih luas dan terfokus.

h. Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang memberikan peluang bagi BGN untuk memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Peningkatan infrastruktur transportasi dan distribusi memungkinkan BGN menjangkau wilayah terpencil dengan lebih mudah, memastikan bahwa program gizi nasional dapat diterapkan secara merata di seluruh pelosok negeri.

i. Inovasi dalam Produk Pangan Bergizi

Industri pangan di Indonesia terus berkembang dengan munculnya inovasi dalam produk pangan yang lebih sehat dan bergizi. BGN dapat berkolaborasi dengan industri pangan untuk mempromosikan produk yang mendukung peningkatan asupan nutrisi di masyarakat. Inovasi pangan ini tidak hanya mencakup produk yang lebih

bergizi, tetapi juga menciptakan solusi untuk masalah distribusi dan aksesibilitas makanan sehat.

j. Partisipasi Komunitas Lokal dalam Program Gizi

BGN memiliki peluang besar untuk melibatkan komunitas lokal dalam pelaksanaan program-program gizi. Dengan memberdayakan tokoh masyarakat, kader gizi, dan organisasi lokal, BGN dapat menciptakan jaringan pendukung yang kuat di lapangan. Partisipasi aktif komunitas ini juga dapat memastikan bahwa intervensi gizi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga lebih efektif dalam menangani masalah gizi di daerah-daerah yang paling membutuhkan.

k. Akses pada Riset dan Inovasi Global

BGN dapat memanfaatkan akses terhadap riset dan inovasi global yang terkait dengan peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Inovasi dalam penelitian gizi, teknologi pangan, serta pendekatan baru dalam intervensi gizi yang didukung oleh lembaga internasional dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia. Hal ini akan membantu BGN dalam mempercepat pengembangan program-program yang lebih efektif dan berbasis bukti untuk meningkatkan status gizi masyarakat di seluruh Indonesia.

l. Dampak sosial-ekonomi positif

Implementasi MBG berpotensi memberikan co-benefits: meningkatkan prestasi dan partisipasi pendidikan anak, serta membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pemerintah mengestimasi program ini dapat menyumbang ~0,1% pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ~820 ribu lapangan kerja baru di daerah. Dampak positif ini menjadi peluang meningkatkan dukungan publik dan politis terhadap program MBG.

Dengan memanfaatkan berbagai peluang ini, BGN dapat memperkuat perannya sebagai lembaga kunci dalam peningkatan gizi nasional dan berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Kolaborasi lintas sektor, dukungan teknologi, dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

4. **Threat (Ancaman)**

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam peningkatan status gizi nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal yang berpotensi menghambat pelaksanaan program-program yang direncanakan. Meskipun memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, BGN juga harus menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari faktor ekonomi, sosial, lingkungan,

hingga birokrasi. Ancaman-ancaman ini dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program-program gizi jika tidak diantisipasi dengan baik. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi ancaman yang dapat berdampak langsung pada pelaksanaan dan pencapaian tujuan strategis BGN. Hasil identifikasi ancaman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Prioritas Kebijakan Pemerintah

Perubahan prioritas kebijakan nasional dapat mempengaruhi dukungan terhadap program-program gizi. Jika pemerintah mengalihkan fokus ke isu lain seperti ekonomi atau infrastruktur, program gizi bagi kelompok siswa pra-sekolah dan sekolah di tingkat dasar hingga menengah bisa kehilangan momentum atau bahkan ditiadakan. Ancaman ini bersifat strategis karena bergantung pada keputusan politik tingkat tinggi yang bisa berdampak langsung pada keberlanjutan program.

b. Skala Sasaran dan Kendala Logistik

Cakupan program sangat luas: MBG menargetkan >80–90 juta penerima (ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak usia PAUD hingga SMA) di seluruh Indonesia. Melayani wilayah kepulauan dan pelosok menghadapi tantangan infrastruktur, transportasi, dan potensi bencana alam yang dapat mengganggu distribusi makanan bergizi.

c. Keberlanjutan Pendanaan dan Perubahan Prioritas

Program MBG memerlukan investasi besar secara berkelanjutan. Meski komitmen awal tinggi, ketergantungan pada APBN membuatnya rentan jika kondisi ekonomi melemah atau terjadi pergantian kebijakan di masa depan. Perubahan prioritas politik atau penghematan anggaran dapat menghambat pencapaian target program jangka panjang.

d. Ketidakstabilan Anggaran dan Pemotongan Dana

Fluktuasi ekonomi nasional atau global dapat mempengaruhi alokasi anggaran untuk program gizi. Pemotongan anggaran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi atau pengalihan dana untuk sektor-sektor lain dapat membatasi kemampuan BGN dalam menjalankan program-program gizi secara berkelanjutan. Ancaman ini strategis karena berdampak pada skala dan jangkauan program yang bisa dijalankan di seluruh Indonesia.

e. Ketimpangan Sosial-Ekonomi

Ketimpangan sosial-ekonomi yang besar di Indonesia menciptakan perbedaan signifikan dalam akses terhadap makanan bergizi. Siswa dari keluarga berpenghasilan rendah di daerah pedesaan dan perkotaan yang padat penduduk cenderung lebih rentan terhadap malnutrisi. Kondisi ini memperlambat upaya BGN

untuk meningkatkan status gizi pada kelompok yang paling membutuhkan, terutama siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

f. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Perubahan iklim dan bencana alam, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, atau badai, dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan, terutama di daerah-daerah pertanian. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakstabilan pasokan bahan baku serta pasokan makanan bergizi itu sendiri, khususnya di daerah terpencil yang infrastrukturnya terbatas. Dampaknya bisa dirasakan dalam jangka panjang, menyebabkan lonjakan malnutrisi dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan gizi di berbagai wilayah terdampak.

g. Tantangan Geografis dan Infrastruktur

Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang signifikan, terutama di daerah terpencil. Akses terhadap daerah-daerah tersebut masih terbatas oleh infrastruktur transportasi yang kurang memadai, yang memperlambat distribusi makanan bergizi dan pelaksanaan program intervensi gizi. Daerah-daerah yang sulit dijangkau seringkali menjadi yang paling rentan terhadap masalah gizi, sehingga ancaman ini perlu diatasi dengan strategi distribusi yang inovatif.

h. Fluktuasi Harga Pangan

Harga bahan pangan yang tidak stabil dapat mempengaruhi ketersediaan makanan bergizi yang disalurkan ke sekolah-sekolah dan kelompok rentan lainnya. Fluktuasi harga, terutama pada bahan pokok dan pangan bergizi, dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penyediaan makanan dan mempengaruhi pelaksanaan program BGN di tingkat sekolah.

i. Ketergantungan pada Kerja Sama Lintas Sektor

Keberhasilan program BGN sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor. Jika sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, tidak berperan secara aktif atau tidak memiliki koordinasi yang baik, BGN akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan program-program gizi. Keterbatasan dalam kolaborasi ini bisa memperlambat implementasi dan efektivitas program secara keseluruhan.

j. Ketergantungan pada Pendanaan Eksternal

BGN menghadapi risiko besar jika terlalu bergantung pada hibah atau bantuan dari donor internasional maupun dari swasta atau BUMN untuk mendanai sebagian besar program-program gizi. Ketika dana eksternal ini dihentikan atau dikurangi, BGN bisa kehilangan sumber pendanaan yang kritis, yang berpotensi mengganggu

keberlanjutan program-program penting. Ancaman ini memaksa BGN untuk mencari solusi jangka panjang yang lebih mandiri secara finansial melalui berbagai alternatif sumber pendanaan yang potensial.

k. Ketimpangan Sosial-Ekonomi

Ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi di Indonesia menciptakan tantangan besar bagi BGN dalam memastikan akses yang merata terhadap makanan bergizi. Kelompok masyarakat miskin cenderung lebih rentan terhadap masalah gizi, karena keterbatasan akses terhadap pangan berkualitas dan layanan kesehatan. Ketimpangan ini mengakibatkan kesenjangan yang mencolok dalam pencapaian target gizi nasional, sehingga mempersulit BGN untuk mencapai keberhasilan yang merata di seluruh wilayah.

l. Kurangnya Kesadaran Gizi pada Orang Tua dan Guru

Banyak orang tua dan guru yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pola makan bergizi bagi pertumbuhan anak-anak. Rendahnya kesadaran ini menjadi ancaman besar dalam upaya BGN untuk meningkatkan status gizi siswa, karena pola makan yang tidak sehat di rumah maupun di sekolah dapat menghambat perkembangan anak-anak secara fisik dan kognitif.

m. Keterbatasan Teknologi dalam Pemantauan Gizi

Keterbatasan teknologi dalam pemantauan gizi merupakan ancaman strategis bagi BGN, karena pemantauan yang efektif sangat bergantung pada sistem digital yang canggih dan terintegrasi. Tanpa teknologi yang memadai, seperti platform digital untuk pengumpulan data dan pelaporan real-time, BGN akan kesulitan memantau status gizi secara akurat dan merespons masalah yang muncul dengan cepat. Selain itu, keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil semakin memperburuk situasi, membuat program-program gizi sulit dijalankan dengan konsisten dan menyeluruh. Akibatnya, kebijakan yang diambil bisa tidak sesuai dengan kondisi lapangan, mengurangi efektivitas intervensi, serta memperlambat pencapaian target peningkatan gizi nasional.

n. Kompleksitas Masalah Gizi (Beban Ganda)

Tantangan gizi di Indonesia bersifat multifaktor: selain kekurangan gizi (stunting, anemia), juga meningkatnya obesitas dan penyakit tidak menular. Intervensi MBG saja tidak cukup mengatasi seluruh akar masalah (mis. pola asuh, sanitasi). Jika faktor pendukung (air bersih, edukasi gizi, kesehatan ibu) tidak berjalan seiring, target perbaikan gizi bisa tidak tercapai optimal.

Ancaman-ancaman ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi BGN dalam menjalankan mandatnya untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia. Agar dapat mengatasi ancaman ini, BGN perlu mengadopsi strategi yang responsif dan proaktif, yang mencakup peningkatan kapasitas internal, penguatan koordinasi lintas sektor, serta mitigasi risiko yang muncul dari tantangan eksternal. Dengan demikian, BGN dapat terus bergerak menuju pencapaian tujuan peningkatan gizi nasional yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas.

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan, Badan Gizi Nasional (BGN) mampu merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif untuk mencapai peningkatan status gizi nasional. Strategi ini diformulasikan melalui pendekatan optimalisasi kekuatan internal yang dimiliki BGN untuk memaksimalkan peluang eksternal yang ada. Kelemahan internal yang ditemukan dapat diperbaiki dengan memanfaatkan peluang yang terbuka, menggunakan kekuatannya, untuk mengatasi ancaman eksternal yang dihadapi dan kelemahan internal diminimalkan untuk menghindari ancaman eksternal. Implikasi strategis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga
Meningkatkan sinergi antara kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pertanian, dan lembaga lainnya akan memastikan kebijakan gizi nasional berjalan terintegrasi. Koordinasi yang efektif ini dapat mempercepat pencapaian target gizi dan meningkatkan dampak program di lapangan.
2. Pengembangan Kebijakan Gizi yang Terintegrasi
Kebijakan gizi yang terintegrasi dengan sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan pertanian, membantu memastikan bahwa program gizi berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Pendekatan lintas sektor ini juga memperkuat dampak intervensi gizi di masyarakat.
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Penguatan kelembagaan diperlukan untuk mendukung tata kelola peningkatan gizi masyarakat yang berkelanjutan, mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan peningkatan efisiensi operasional.
4. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Program Gizi
Pengawasan dan evaluasi berbasis data yang komprehensif membantu memastikan bahwa program gizi berjalan sesuai rencana dan mencapai target. Sistem pengawasan ini juga memungkinkan identifikasi cepat terhadap kelemahan program dan perbaikan yang tepat waktu.

5. **Pengembangan Sistem Informasi Gizi Terintegrasi**
Pengembangan Sistem Informasi Gizi Terintegrasi berfungsi memfasilitasi pengumpulan data secara real-time, pemantauan, dan evaluasi program gizi secara nasional. Sistem ini memastikan pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat, memungkinkan respons cepat terhadap masalah gizi, serta mendukung alokasi sumber daya yang lebih efisien dan terarah. Selain itu, sistem terintegrasi ini memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program gizi di seluruh wilayah.
6. **Pengembangan Infrastruktur Distribusi Makanan Bergizi**
Memperbaiki infrastruktur distribusi makanan bergizi, terutama di daerah-daerah terpencil, akan membantu mengatasi ketimpangan akses terhadap makanan bergizi. Hal ini memastikan bahwa masyarakat di semua wilayah mendapatkan manfaat dari program distribusi makanan bergizi, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau.
7. **Pengembangan Kerjasama Internasional**
BGN perlu memperluas jaringan kerjasama internasional dengan lembaga-lembaga global seperti WHO, FAO dan UNICEF untuk mendapatkan dukungan teknis dan pendanaan dalam menjalankan program-program gizi di Indonesia.
8. **Pengembangan dan Pengelolaan Kemitraan Strategis dengan BUMN dan Swasta untuk Mendukung Peningkatan Gizi Nasional**
Kemitraan strategis dengan BUMN dan sektor swasta dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam upaya peningkatan gizi nasional. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), BUMN dan swasta dapat membantu pendistribusian makanan bergizi secara lebih merata, khususnya di wilayah terpencil dan rentan gizi. Selain itu, dukungan dari sektor ini juga dapat digunakan untuk memperluas kampanye edukasi gizi di sekolah-sekolah dan masyarakat umum, memperkuat upaya BGN dalam memperbaiki status gizi masyarakat di seluruh Indonesia.
9. **Pengelolaan Dana dari Donor dan Pihak Eksternal**
Mengoptimalkan sumber pendanaan dari donor internasional, lembaga swasta, BUMN serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), program gizi dapat memiliki pondasi finansial yang lebih stabil dan berkelanjutan. Diversifikasi sumber pendanaan ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah, tetapi juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam merespon kebutuhan yang mendesak, seperti krisis pangan atau intervensi gizi di daerah-

daerah yang rawan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana dan laporan berkala mengenai efektivitas penggunaan dana dari pihak eksternal dapat meningkatkan kepercayaan donor, mendorong kontribusi lebih lanjut, serta memastikan bahwa program gizi berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

10. Pengembangan Model Pendanaan Berkelanjutan

Mengembangkan model pendanaan berkelanjutan merupakan langkah strategis penting untuk menjaga stabilitas program gizi dalam jangka panjang. Model ini dapat mencakup diversifikasi sumber pendanaan, seperti melalui kemitraan dengan sektor swasta, BUMN, serta lembaga internasional dan donor. Selain itu, memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor swasta dan BUMN dapat memberikan dukungan tambahan yang berkelanjutan. Pendanaan juga bisa diperoleh melalui insentif fiskal, di mana perusahaan yang mendukung program gizi mendapatkan pengurangan pajak atau fasilitas lainnya. Model ini memastikan bahwa program gizi tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah, sehingga dapat berjalan stabil bahkan saat terjadi perubahan kebijakan atau fluktuasi ekonomi. Dengan pendanaan yang lebih stabil dan beragam, pelaksanaan program gizi akan lebih efisien dan berdampak luas.

11. Ekspansi Program Fortifikasi Pangan

Pengembangan program fortifikasi pangan dapat meningkatkan asupan nutrisi di masyarakat, terutama melalui kerja sama dengan industri pangan. Produk-produk yang difortifikasi dengan zat gizi penting seperti zat besi, yodium, dan vitamin A dapat mengurangi angka kekurangan gizi mikro di berbagai daerah.

12. Diversifikasi Sumber Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan

Memanfaatkan keragaman pangan lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan di berbagai wilayah. BGN dapat mendorong produksi dan konsumsi makanan lokal yang kaya akan nutrisi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor atau pangan yang sulit dijangkau.

13. Intervensi Gizi Spesifik di Daerah Rawan Gizi

Program intervensi yang lebih intensif di daerah dengan prevalensi stunting dan wasting tinggi sangat penting. Penyediaan makanan tambahan dan program fortifikasi di wilayah-wilayah tersebut dapat membantu menurunkan angka malnutrisi.

14. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Gizi Seimbang**
Kampanye nasional yang terstruktur dan berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan seimbang. Perubahan perilaku di tingkat keluarga dan komunitas menjadi salah satu faktor utama dalam mengurangi malnutrisi dan meningkatkan status gizi nasional.
15. **Integrasi Edukasi Gizi dalam Kurikulum Sekolah**
Mengintegrasikan program edukasi gizi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah akan memberikan dampak jangka panjang pada pola makan anak-anak. Edukasi gizi sejak dini dapat membantu membentuk kebiasaan makan sehat, sekaligus meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya asupan gizi yang tepat.
16. **Pemberdayaan Komunitas dalam Pelaksanaan Program Gizi**
Melibatkan komunitas lokal dalam implementasi program gizi, seperti kader gizi atau tokoh masyarakat, dapat memperkuat pemantauan di tingkat akar rumput. Partisipasi aktif masyarakat akan meningkatkan keberlanjutan program dan efektivitas intervensi gizi.
17. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Tingkat Lokal**
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Tingkat Lokal merupakan upaya strategis dalam memperkuat pelaksanaan program gizi. Tenaga lokal, seperti petugas kesehatan dan tenaga kependidikan perlu dibekali keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik untuk menjalankan program secara efektif. Pelatihan teknis dalam pemantauan gizi, edukasi tentang pola makan sehat, dan penggunaan teknologi digital untuk pengumpulan data akan memperkuat implementasi di lapangan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM juga mencakup kemampuan mereka berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan sumber daya dimanfaatkan optimal dan jangkauan program diperluas, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi khusus.
18. **Respons Cepat terhadap Krisis dan Bencana**
Pengembangan mekanisme respons cepat terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim untuk memastikan bahwa distribusi makanan bergizi tetap berjalan di daerah terdampak. Penyediaan cadangan pangan dan peningkatan fleksibilitas logistik mendukung akses terhadap makanan bergizi di masa-masa darurat.

Implikasi strategis yang dirumuskan berdasarkan analisis SWOT memberikan kerangka yang kuat bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program-program gizi secara lebih terarah dan efektif. Dengan memaksimalkan kekuatan internal, memperbaiki kelemahan, serta memanfaatkan peluang eksternal, BGN dapat memastikan pelaksanaan

program gizi yang berkelanjutan dan berdampak luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Di sisi lain, strategi untuk mengatasi ancaman eksternal seperti ketidakstabilan harga pangan dan krisis ekonomi juga akan memperkuat ketahanan gizi nasional. Melalui langkah-langkah strategis yang komprehensif, BGN mampu berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif.

E. Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, fungsi, serta manfaat dan peran strategis organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi BGN

Dalam rangka menghadapi tantangan gizi nasional dan mendukung tercapainya pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, Badan Gizi Nasional (BGN) merumuskan visi dan misi untuk periode 2025-2029. Visi dan misi ini bertujuan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program-program gizi yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Berfokus pada peningkatan akses pangan bergizi, penguatan kebijakan, serta sinergi antar lembaga, visi dan misi ini dirancang untuk menurunkan angka malnutrisi, meningkatkan status gizi masyarakat, serta mendukung target pembangunan kesehatan dan kesejahteraan nasional. Melalui visi dan misi yang dirumuskan, BGN berkomitmen untuk memastikan setiap lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memiliki akses terhadap makanan bergizi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Visi Badan Gizi Nasional (BGN) 2025-2029 adalah:

Visi *“Terwujudnya Modal Manusia Berkualitas untuk Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.*

Visi ini menekankan pentingnya gizi yang optimal sebagai fondasi utama dalam membangun SDM yang unggul, sehat, dan produktif. Kualitas SDM tidak hanya diukur dari kemampuan intelektual dan keterampilan, tetapi juga dari kesehatan fisik dan mental yang sangat dipengaruhi oleh pemenuhan gizi. Dalam upaya mewujudkan SDM berkualitas, BGN berperan penting dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama siswa pra sekolah dan sekolah di tingkat dasar hingga menengah, mendapatkan akses yang memadai terhadap makanan bergizi. Visi ini tidak hanya terbatas pada peningkatan status gizi jangka pendek, melainkan juga diarahkan untuk pencapaian tujuan jangka panjang yang harmonis dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam upaya mewujudkan visi BGN 2025-2029, dikembangkan beberapa misi strategis yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan. Setiap misi berfokus pada aspek yang kritis dalam penanganan masalah gizi di Indonesia, dengan memperhatikan berbagai kelompok masyarakat

yang rentan terhadap kekurangan gizi, serta penguatan kerjasama dan tata kelola lintas sektor.

a. Misi 1: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pemenuhan Gizi

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat yang rentan terhadap kekurangan gizi di Indonesia, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita dan siswa prasekolah dan sekolah di tingkat dasar hingga menengah, mendapatkan akses yang mudah, aman, dan berkelanjutan terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Makan bergizi yang mencakup asupan seimbang dari karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral menjadi pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan akses merata terhadap makanan bergizi sebagai langkah awal dalam menciptakan generasi yang sehat dan produktif, serta mendukung pembangunan SDM unggul. Fokus dari misi ini mencakup distribusi makanan bergizi dan pengembangan infrastruktur pangan di daerah terpencil dan wilayah rentan.

b. Misi 2: Mengoptimalkan Promosi dan Edukasi Gizi, serta Kemitraan Strategis yang Terintegrasi

Misi ini dirancang sebagai langkah strategis untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia dalam hal pemenuhan gizi. Pendekatan yang dilakukan mencakup kampanye promosi gizi secara masif dan edukasi berkelanjutan kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari keluarga hingga lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Selain memperkuat aspek edukatif, BGN juga mengedepankan pembentukan kemitraan strategis yang kuat dan berkelanjutan dengan sektor publik, BUMN, swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan mitra internasional. Integrasi edukasi dengan kemitraan strategis ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penyampaian informasi gizi, memperluas cakupan program, dan memperkuat dampak positif dalam peningkatan kualitas gizi nasional secara menyeluruh.

c. Misi 3: Memperkuat Tata Kelola dan Koordinasi dalam Pemenuhan Gizi Nasional

Misi ketiga dirancang untuk memastikan bahwa program-program pemenuhan gizi dijalankan secara efektif, transparan, dan akuntabel melalui pengembangan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang kuat dan jelas. Penguatan sistem mencakup pembangunan infrastruktur pendukung, mekanisme distribusi yang andal, serta pengelolaan data dan informasi gizi yang akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Di sisi lain, tata kelola difokuskan pada koordinasi lintas sektor,

penyusunan regulasi yang adaptif, dan penerapan standar operasional yang konsisten. Mengingat setiap pelaksanaan program pemenuhan gizi memiliki potensi risiko, baik terkait distribusi pangan, kualitas produk, maupun implementasi kebijakan di lapangan, maka pengelolaan risiko secara aktif melalui manajemen risiko yang sistematis menjadi bagian integral dalam penguatan sistem dan tata kelola tersebut, guna memastikan pencapaian tujuan pemenuhan gizi secara efektif dan berkelanjutan.

d. Misi 4: Mengoptimalkan Pemantauan dan Pengawasan Pemenuhan Gizi Nasional

Misi ini bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan berbagai program pemenuhan gizi nasional melalui sistem pemantauan dan pengawasan yang ketat, sistematis, dan terintegrasi. Optimalisasi pemantauan melibatkan pengumpulan data secara rutin terkait implementasi kebijakan, distribusi pangan bergizi, serta kualitas dan keamanan produk pangan yang disalurkan ke masyarakat. Di sisi lain, pengawasan mencakup inspeksi berkala, audit proses operasional, dan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi, guna mendeteksi secara dini berbagai risiko, tantangan, atau penyimpangan dalam pelaksanaan program. Penggunaan teknologi informasi yang canggih juga diterapkan untuk mendukung transparansi dan akurasi dalam pemantauan serta pengawasan secara real-time, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat waktu. Dengan mekanisme pemantauan dan pengawasan yang optimal, diharapkan program pemenuhan gizi dapat berjalan efisien, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak positif jangka panjang dalam pencapaian tujuan strategis nasional.

e. Misi 5: Mewujudkan Dukungan Manajemen yang Optimal dalam Pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional

Misi ini difokuskan untuk memperkuat kapasitas internal Badan Gizi Nasional dalam rangka pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Dukungan manajemen optimal tersebut meliputi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, profesional, serta memiliki integritas tinggi, didukung oleh budaya organisasi yang kondusif dan produktif. Selain itu, aspek pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil menjadi prioritas untuk memastikan efektivitas penggunaan dana publik. Optimalisasi teknologi informasi dan manajemen data juga menjadi perhatian guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat berdasarkan data yang valid. Selanjutnya, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

dilakukan secara tertib, terencana, dan bertanggung jawab untuk menunjang efisiensi operasional. Terakhir, implementasi manajemen risiko yang sistematis dan berkelanjutan dilakukan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, serta mengelola berbagai risiko operasional secara proaktif, demi menjamin tercapainya tujuan strategis organisasi menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan misi-misi tersebut, BGN berkomitmen untuk menjawab berbagai tantangan gizi yang dihadapi Indonesia secara efektif dan berkelanjutan. Implementasi yang konsisten dan terintegrasi dari setiap misi diharapkan mampu mewujudkan peningkatan signifikan dalam status gizi nasional, mendukung terciptanya modal manusia yang sehat, produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, serta secara nyata mempercepat pencapaian visi besar Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

2. Sasaran Strategis

Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki beberapa Sasaran Strategis yang dirancang untuk menciptakan dampak nyata dalam perbaikan status gizi masyarakat Indonesia. Sasaran Strategis ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi alat ukur keberhasilan setiap program strategis yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan utama meningkatkan kualitas gizi di seluruh negeri. Melalui pencapaian sasaran-sasaran kegiatan ini, BGN berkomitmen untuk menciptakan perubahan nyata dalam perbaikan status gizi masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat mencapai generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Sasaran Strategis BGN tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target
SS 1: Terwujudnya Sistem dan Tata Kelola pemenuhan gizi nasional yang efektif (mekanisme, prosedur, dan standar tata kelola pemenuhan gizi)	IKSS 1.1: Persentase pemenuhan kebijakan/ peraturan/pedoman di bidang pemenuhan gizi nasional	85%
	IKSS 1.2: Jumlah kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional yang diterapkan	5

Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target
	IKSS 1.3: Persentase komplain yang ditindaklanjuti	100%
SS 2: Terwujudnya penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif	IKSS 2.1 Persentase siswa/santri yang mendapatkan makan bergizi gratis	24%
	IKSS 2.2: Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mendapatkan makan bergizi gratis	11%
	IKSS 2.3: Persentase kenaikan status gizi penerima manfaat program makan bergizi gratis	5%
SS 3: Terwujudnya literasi gizi masyarakat tentang makan bergizi secara optimal	IKSS 3.1: Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik	50%
	IKSS 3.2: Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik	50%
SS 4: Terwujudnya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional	IKSS 4.1: Persentase kerjasama di bidang pemenuhan gizi nasional yang efektif	85%
	IKSS 4.2: Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemenuhan gizi nasional	80%
SS 5: Terwujudnya satuan pelayanan pemenuhan gizi sesuai standar	IKSS 5.1: Persentase SPPG satuan pelayanan (dapur) yang sesuai standar	95%
SS 6: Terwujudnya tata kelola dan pemerintahan Badan Gizi Nasional yang optimal	IKSS 6.1: Indeks RB BGN	76

a. SS 1: Terwujudnya Sistem dan Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional yang Efektif (Mekanisme, Prosedur, dan Standar Tata Kelola Pemenuhan Gizi)

Deskripsi:

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan sistem dan tata kelola pemenuhan gizi yang secara optimal mekanisme, prosedur, dan standar tata kelola yang terpadu, transparan, akuntabel, serta berbasis bukti. Sasaran ini mencakup penguatan koordinasi lintas sektor dan lembaga, harmonisasi kebijakan, serta sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam upaya perbaikan status gizi secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)**IKSS 1.1: Persentase Pemenuhan Kebijakan/Peraturan/Pedoman di Bidang Pemenuhan Gizi Nasional****- Definisi Operasional**

Mengukur tingkat ketercapaian penyusunan dan/atau adopsi serta implementasi dokumen kebijakan, peraturan, dan pedoman teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung sistem pemenuhan gizi nasional secara efektif dan terstandar.

- Operasionalisasi

Persentase dihitung sebagai jumlah dokumen kebijakan/peraturan/pedoman yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah dokumen kebijakan/peraturan/pedoman yang direncanakan.

- Sumber Data

Laporan internal dari pelaksanaan sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional.

IKSS 1.2: Jumlah Kebijakan di Bidang Pemenuhan Gizi Nasional yang Diterapkan**- Definisi Operasional**

Jumlah dokumen kebijakan formal yang telah disahkan, disosialisasikan, dan diimplementasikan oleh instansi pemerintah pusat dan/atau daerah, serta digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi intervensi pemenuhan gizi.

- Operasionalisasi

Dihitung berdasarkan jumlah kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional yang disusun dan diterapkan.

- Sumber Data

Laporan internal pelaksanaan penyusunan dan penerapan kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional.

IKSS 1.3: Persentase Komplain yang Ditindaklanjuti

- **Definisi Operasional**

Indikator ini menunjukkan proporsi jumlah pengaduan, keluhan, atau komplain dari masyarakat, mitra kerja, atau pemangku kepentingan lainnya terkait layanan atau kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional yang telah direspons dan ditindaklanjuti secara tuntas oleh instansi terkait dalam periode tertentu.

- **Operasionalisasi**

Persentase dihitung berdasarkan jumlah komplain yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah komplain yang diterima.

- **Sumber Data**

Laporan internal tindak lanjut atas pengaduan yang diterima.

b. SS 2: Terwujudnya Penyediaan dan Penyaluran Makan Bergizi yang Efektif

Deskripsi:

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan pengadaan, pengolahan, distribusi, dan penyediaan makanan bergizi dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai standar gizi serta keamanan pangan, guna memenuhi kebutuhan gizi kelompok sasaran prioritas (seperti ibu hamil, balita, remaja putri, dan kelompok rentan lainnya) secara berkelanjutan. Efektivitas dinilai dari keterpenuhan jumlah dan mutu makanan bergizi, cakupan penerima manfaat, serta kelancaran distribusi sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

IKSS 2.1: Persentase Siswa/Santri yang Mendapatkan Makan Bergizi Gratis

- **Definisi Operasional**

Indikator ini menunjukkan proporsi siswa sekolah dan/atau santri di satuan pendidikan formal atau keagamaan yang menerima makanan bergizi tanpa dikenai biaya, yang disediakan melalui program pemerintah pusat/daerah atau lembaga terkait, dalam periode tertentu.

- **Operasionalisasi**

Persentase dihitung berdasarkan jumlah siswa/santri yang menerima makan bergizi gratis dibandingkan dengan jumlah total siswa/santri sesuai target.

- **Sumber Data**

Laporan internal unit kerja terkait berdasarkan data pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa/santri.

IKSS 2.2: Persentase Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita yang Mendapatkan Makan Bergizi Gratis

- **Definisi Operasional**

Indikator ini menunjukkan proporsi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menerima makanan bergizi tanpa dikenai biaya, yang disediakan melalui program pemerintah pusat/daerah atau lembaga terkait, dalam periode tertentu.

- **Operasionalisasi**

Persentase dihitung berdasarkan jumlah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menerima makan bergizi gratis dibandingkan dengan jumlah total ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sesuai target.

- **Sumber Data**

Laporan internal unit kerja terkait berdasarkan data pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

IKSS 2.3: Persentase Kenaikan Status Gizi Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis

- **Definisi Operasional**

Persentase kenaikan status gizi adalah ukuran proporsional yang menunjukkan jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalami peningkatan kategori status gizi (misalnya dari gizi kurang menjadi gizi normal) dalam kurun waktu tertentu. Status gizi ditentukan berdasarkan hasil pengukuran antropometri (berat badan, tinggi badan) dan mengacu pada standar WHO atau Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penilaian Status Gizi Anak.

- **Operasionalisasi**

Persentase dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang mengalami kenaikan status gizi dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat yang diukur pada awal periode. Pengukuran dilakukan minimal dua kali dalam setahun (awal dan akhir semester).

- **Sumber Data**

Data antropometri penerima manfaat diperoleh dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan/atau sekolah (melalui UKS atau petugas gizi sekolah). Data status gizi dari Aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) milik Kementerian Kesehatan.

c. SS 3: Terwujudnya Literasi Gizi Masyarakat tentang Makan Bergizi secara Optimal

Deskripsi:

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam memilih, mengolah, serta mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan aman sesuai kebutuhan gizi individu. Literasi gizi yang optimal mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami informasi gizi dari berbagai sumber secara kritis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari guna mencegah masalah gizi seperti stunting, obesitas, anemia, serta penyakit tidak menular terkait pola makan. Peningkatan literasi gizi dilakukan melalui edukasi publik yang terintegrasi, kampanye komunikasi perubahan perilaku, penyediaan informasi yang mudah diakses dan berbasis bukti, serta penguatan peran keluarga, sekolah, dan komunitas sebagai agen perubahan dalam pola konsumsi makanan bergizi.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

IKSS 3.1: Persentase Siswa dan Santri dengan Skor Literasi Gizi Baik

- **Definisi Operasional**

Indikator ini mengukur proporsi siswa dan santri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk di lembaga pendidikan formal dan pesantren, yang memiliki tingkat literasi gizi pada kategori "baik." Literasi gizi baik didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami informasi gizi, menilai informasi tersebut secara kritis, dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari guna mendukung pola makan sehat dan hidup bersih. Skor literasi gizi dinyatakan "baik" apabila individu mencapai minimal 75% dari total nilai maksimum yang dapat diperoleh.

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pengukuran terhadap tiga komponen utama:

- a. Pengetahuan Gizi: pemahaman mengenai makanan bergizi seimbang, zat gizi makro dan mikro, serta risiko gizi buruk;
- b. Sikap terhadap Gizi: persepsi, kepedulian, dan nilai yang diberikan terhadap praktik makan bergizi;

- c. Perilaku Gizi: praktik aktual seperti kebiasaan sarapan, konsumsi sayur dan buah, membaca label gizi, dan pemilihan makanan sehat.
- **Operasionalisasi**
 Persentase dihitung berdasarkan jumlah siswa dan santri dengan skor literasi gizi kategori baik dibandingkan dengan total responden siswa dan santri yang diukur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan survei terstandar menggunakan kuesioner literasi gizi yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku.
- **Sumber Data**
 - a. Laporan hasil survei literasi gizi nasional Badan Gizi Nasional (BGN) atau Kementerian Kesehatan melalui kolaborasi survei nasional.
 - b. Data dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, atau institusi pendidikan lainnya
 - c. Instrumen survei yang divalidasi oleh ahli gizi dan pendidikan.

IKSS 3.2: Persentase Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Pengasuh Balita dengan Skor Literasi Gizi Baik

- **Definisi Operasional**
 Indikator ini mengukur proporsi ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita yang memiliki pemahaman, kemampuan, dan perilaku gizi yang baik, yang dinilai berdasarkan skor literasi gizi menggunakan instrumen baku. Literasi gizi yang baik mencerminkan kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi gizi secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.
- **Operasionalisasi**
 Persentase dihitung berdasarkan jumlah ibu hamil, menyusui, dan pengasuh dengan skor baik dibandingkan dengan total responden ibu hamil, menyusui, dan pengasuh yang survei. Metode pengumpulan data dilakukan dengan survei terstandar menggunakan kuesioner literasi gizi yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku
- **Sumber Data**
 - a. Survei primer oleh dinas kesehatan, puskesmas, atau mitra pelaksana
 - b. Data pelengkap dari program intervensi gizi (misalnya: PKK, posyandu, PAUD, BIAN, dsb.)
 - c. Instrumen kuesioner yang disusun bersama ahli gizi masyarakat dan kesehatan ibu-anak

d. SS 4: Terwujudnya Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat yang Efektif dalam Mendukung Implementasi Pemenuhan Gizi Nasional

Deskripsi:

Sasaran strategis ini mengacu pada terciptanya sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional melalui berbagai bentuk kolaborasi, partisipasi aktif, dan pemberdayaan yang terstruktur. Efektivitas kerjasama dan pemberdayaan diukur dari seberapa besar kontribusi dan dampak nyata yang diberikan oleh masyarakat dan mitra terkait dalam meningkatkan status gizi individu maupun keluarga secara berkelanjutan, terutama pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan remaja.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

IKSS 4.1: Persentase Kerjasama di Bidang Pemenuhan Gizi Nasional yang Efektif

- **Definisi Operasional**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak (pemerintah, swasta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lainnya) yang terbukti menghasilkan kontribusi terhadap pemenuhan gizi nasional dan membantu masyarakat mendapatkan akses gizi yang lebih baik. Kerjasama disebut efektif jika berdampak langsung, berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat nyata seperti distribusi makanan bergizi, edukasi gizi, atau peningkatan layanan gizi.

- **Operasionalisasi**

Persentase dihitung berdasarkan jumlah kerjasama yang efektif dibandingkan dengan total kerjasama yang dibentuk.

- **Sumber Data**

Dokumen MoU/PKS, laporan kegiatan, basis data kerjasama lintas sektor yang dikelola oleh unit kerja hubungan kemitraan atau sekretariat BGN, laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kolaboratif.

IKSS 4.2: Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional

- **Definisi Operasional**

Indikator ini mengukur persentase keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan/program yang mendukung perbaikan status gizi masyarakat, baik melalui peran sebagai penerima manfaat, pelaksana, maupun penggerak.

- **Operasionalisasi**
Persentase dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dibandingkan dengan jumlah masyarakat sasaran program.
- **Sumber Data**
Laporan program gizi (BGN, Dinkes, Posyandu), survei partisipasi masyarakat, data monitoring kegiatan oleh pelaksana program.

e. SS 5: Terwujudnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sesuai Standar

Deskripsi:

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memastikan keberadaan dan berfungsinya satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai tingkat wilayah yang sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Satuan pelayanan ini mencakup SPPG (dapur), fasilitas penyedia makanan bergizi di sekolah, posyandu, puskesmas, dan unit layanan sosial lainnya yang secara langsung menyediakan asupan gizi kepada kelompok sasaran, seperti anak-anak (balita, anak sekolah, santri), ibu hamil dan menyusui. Melalui sasaran ini, diharapkan setiap layanan pemenuhan gizi mampu berkontribusi secara nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat, penurunan angka stunting, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

IKSS 5.1: Persentase SPPG Satuan Pelayanan (Dapur) yang sesuai Standar

- **Definisi Operasional**
Indikator ini mengukur persentase satuan pelayanan berupa dapur penyedia makanan bergizi (dapur gizi komunitas, dapur sekolah, dapur layanan sosial, dan sejenisnya) yang telah memenuhi seluruh persyaratan minimal sesuai standar nasional yang ditetapkan. Standar tersebut mencakup aspek kelayakan infrastruktur, keamanan pangan, kapasitas dan sertifikasi tenaga kerja, manajemen bahan pangan, pencatatan dan pelaporan, serta kepatuhan terhadap ketentuan higienitas dan sanitasi.
- **Operasionalisasi**
Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah SPPG (dapur) yang memenuhi standar dibandingkan dengan jumlah SPPG (dapur) yang terdata.
- **Sumber Data**
Hasil verifikasi lapangan/dokumen oleh BGN, sistem pelaporan digital SPPG, dan dokumen verifikasi pemenuhan standar teknis.

f. SS 6: Terwujudnya Tata Kelola dan Pemerintahan Badan Gizi Nasional yang Optimal

Deskripsi:

Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif dalam menjawab tantangan pemenuhan gizi nasional. Tata kelola yang optimal mencakup penguatan struktur organisasi, perumusan kebijakan yang berbasis data dan bukti, sistem pengendalian intern yang andal, serta penerapan manajemen kinerja yang terintegrasi di seluruh lini organisasi.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

IKSS 6.1: Indeks RB BGN

- **Definisi Operasional**

Indikator ini merupakan ukuran kinerja reformasi birokrasi yang menunjukkan tingkat kemajuan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Indeks ini mencerminkan efektivitas kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik di bidang pemenuhan gizi nasional.

- **Operasionalisasi**

Indikator ini dihitung berdasarkan bobot penilaian atas komponen-komponen area perubahan dan hasil dengan skor maksimal 100, yaitu dengan membandingkan nilai total dari seluruh area perubahan dan hasil dibandingkan dengan skor maksimal.

- **Sumber Data**

Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BGN, Hasil evaluasi dari Kementerian PANRB, dan Sistem Informasi RB Nasional.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Kerja menyusun Perjanjian Kinerja Badan Gizi Nasional Tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BGN Tahun 2025 secara rinci dijelaskan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Satuan	Target
SS 1: Terwujudnya Sistem dan Tata Kelola pemenuhan gizi nasional yang efektif (mekanisme, prosedur, dan standar tata kelola pemenuhan gizi)	IKSS 1.1: Persentase pemenuhan kebijakan/ peraturan/pedoman di bidang pemenuhan gizi nasional	Persen	85
	IKSS 1.2: Jumlah kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional yang diterapkan	Nilai	5
	IKSS 1.3: Persentase komplain yang ditindaklanjuti	Persen	100
SS 2: Terwujudnya penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif	IKSS 2.1 Persentase siswa/santri yang mendapatkan makan bergizi gratis	Persen	24
	IKSS 2.2: Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mendapatkan makan bergizi gratis	Persen	11
	IKSS 2.3: Persentase kenaikan status gizi penerima manfaat program makan bergizi gratis	Persen	5
SS 3: Terwujudnya literasi gizi masyarakat tentang makan bergizi secara optimal	IKSS 3.1: Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik	Persen	50
	IKSS 3.2: Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik	Persen	50
SS 4: Terwujudnya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional	IKSS 4.1: Persentase kerjasama di bidang pemenuhan gizi nasional yang efektif	Persen	85
	IKSS 4.2: Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemenuhan gizi nasional	Persen	80

Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Satuan	Target
SS 5: Terwujudnya satuan pelayanan pemenuhan gizi sesuai standar	IKSS 5.1: Persentase SPPG satuan pelayanan (dapur) yang sesuai standar	Persen	95
SS 6: Terwujudnya tata kelola dan pemerintahan Badan Gizi Nasional yang optimal	IKSS 6.1: Indeks RB BGN	Indeks	76

Dalam mewujudkan target kinerja tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan lokasi anggaran sebesar Rp 71.000.000.000.000 (Tujuh Puluh Satu Triliun Rupiah). Alokasi anggaran tersebut secara rinci dijelaskan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen	7.424.979.558.000
2	Program Pemenuhan Gizi Nasional	63.575.020.442.000
Total		71.000.000.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 yang terbit pada tanggal 1 Februari 2025, BGN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 71.000.000.000.000. Pengukuran capaian kinerja BGN Triwulan II Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BGN dari Januari sampai dengan Juni 2025. BGN memiliki 6 (enam) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja, yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja.

1. SS 1: Terwujudnya Sistem dan Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional yang Efektif (Mekanisme, Prosedur, dan Standar Tata Kelola Pemenuhan Gizi)

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja Triwulan II			Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%
Terwujudnya Sistem dan Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional yang Efektif (Mekanisme, Prosedur, dan Standar Tata Kelola Pemenuhan Gizi)	IKSS 1.1 Persentase Pemenuhan Kebijakan/Peraturan/Pedoman di Bidang Pemenuhan Gizi Nasional	16,13	16,13	100	85	16,13	18,98
	IKSS 1.2 Jumlah kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional yang diterapkan	1	1	100	5	1	20
	IKSS 1.3 Persentase komplain yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

IKSS 1.1 Persentase Pemenuhan Kebijakan/ Peraturan/ Pedoman di Bidang Pemenuhan Gizi Nasional

Indikator ini mencerminkan sejauh mana kebijakan, peraturan, dan pedoman nasional di bidang pemenuhan gizi termasuk NSPK dan rekomendasi kebijakan yang telah diimplementasikan secara efektif oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam Perjanjian Kinerja BGN 2025 yang ditandatangani pada 20 Januari 2025 ditetapkan target kinerja berupa tercapainya 85% tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan pedoman gizi nasional.

Untuk mendukung target 85% tersebut, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola menetapkan capaian pelaksanaan sebesar 27 kebijakan, peraturan, atau pedoman yang harus diadopsi oleh SPPG. Angka ini mewakili porsi realisasi target keseluruhan, saat 27 dari total kebijakan yang ditetapkan telah diimplementasikan, maka target kepatuhan 85% tersebut telah dipenuhi.

Oleh karena itu, perhitungan dari indikator Persentase Pemenuhan Kebijakan/Peraturan/Pedoman di Bidang Pemenuhan Gizi Nasional dengan membagi jumlah kebijakan, peraturan, atau pedoman gizi yang telah ditetapkan dengan jumlah total kebijakan, peraturan, atau pedoman gizi yang seharusnya ditetapkan.

Pada Triwulan II, Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola telah mengeluarkan 5 Rekomendasi Kebijakan atau Pedoman dengan membangun kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan para pakar gizi, lembaga pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional dalam proses penyusunan pedoman teknis (NSPK) dan rekomendasi kebijakan yang kemudian dijadikan dasar oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola. Output kebijakan ini, setelah digodok bersama stakeholder kemudian dilegalisasi secara resmi melalui Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional. Selanjutnya, kebijakan tersebut disosialisasikan secara menyeluruh kepada Mitra, Yayasan, Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan untuk memperkuat pemahaman mereka terkait proses Verifikasi dan Validasi, Pengelolaan Keuangan SPPG, Penyediaan dan Distribusi Susu, Perencanaan Menu, serta Distribusi MBG untuk Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita. Dengan hal tersebut, capaian indikator ini sebesar 100%. Dokumen yang telah disusun tersebut adalah Petunjuk Teknis Pemilihan Mitra/Yayasan dalam Pengelolaan SPPG. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025, capaian indikator ini sebesar 18,98% yang dihitung dari realisasi 5 dokumen

kebijakan/peraturan/pedoman di bidang pemenuhan gizi nasional dibandingkan dengan 27 target dalam 1 tahun.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini adalah banyaknya pedoman yang dalam tahap penyusunan dan pengembangan. Adapun rencana tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan berkoordinasi dengan pakar serta lintas instansi dalam pengembangan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

IKSS 1.2 Jumlah Kebijakan di Bidang Pemenuhan Gizi Nasional yang Diterapkan

Jumlah kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional merujuk pada jumlah pedoman teknis (NSPK) dan rekomendasi kebijakan yang telah secara resmi diterapkan atau diimplementasikan melalui Surat Keputusan Kepala Badan. Oleh karena itu, pengukurannya dengan menghitung jumlah kebijakan dengan Surat Keputusan Kepala Badan.

Telah dilakukan penyusunan kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional yang telah diterapkan sebanyak 1 dokumen pada TW II, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%. Dokumen yang telah disusun dan diterapkan tersebut adalah Pedoman Verifikasi Calon SPPG dan Penempatan SPPI BGN. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025, capaian indikator ini sebesar 20% yang dihitung dari realisasi 1 dokumen kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional dibandingkan dengan 5 target dalam 1 tahun.

Proses pengembangan pedoman atau petunjuk teknis (NSPK atau rekomendasi kebijakan) oleh Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola berjalan sangat detail dan komprehensif, melibatkan banyak pendapat dari pakar gizi dan instansi terkait. Setiap naskah disusun secara berlapis dan melewati tahap revisi yang panjang, mulai dari tata naskah hingga isi kebijakan. Sebelum akhirnya dinyatakan sempurna dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala BGN. Mekanisme panjang ini menjamin kualitas output kebijakan memenuhi standar tata kelola yang baik dan akuntabilitas internal.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini adalah kendala dalam proses penyusunan dan pengembangan bersama pakar dan instansi terkait serta beberapa kebijakan masih dalam tahap kelengkapan administrasi untuk mendukung SK Kepala Badan Gizi Nasional. Adapun rencana tindak lanjut untuk mengatasi

kendala tersebut adalah dengan berkoordinasi lintas unit kerja dengan efektif dan efisien untuk memenuhi proses pengadministrasian dengan baik.

IKSS 1.3 Persentase komplain yang ditindaklanjuti

Indikator ini dihitung pada akhir tahun.

2. SS 2: Terwujudnya Penyediaan dan Penyaluran Makan Bergizi yang Efektif

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja Triwulan II			Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%
Terwujudnya penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif	IKSS 2.1 Persentase siswa/santri yang mendapatkan makan bergizi gratis	24	12,18	0,51	24	12,18	0,51
	IKSS 2.2 Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mendapatkan makan bergizi gratis	11	1,25	0,11	11	1,25	0,11
	IKSS 2.3 Persentase kenaikan status gizi penerima manfaat program makan bergizi gratis	5	1,33	0,27	5	1,33	0,27

IKSS 2.1 Persentase Siswa/Santri yang Mendapatkan Makan Bergizi Gratis

Telah dilakukan penyaluran makan bergizi gratis terhadap siswa sekolah dan/atau santri selama TW II. Pada TW II, target penyaluran makan bergizi gratis kepada siswa sekolah dan/atau santri adalah sebesar 24% dengan realisasi sebesar 12,18%. Dengan demikian, capaian indikator tersebut adalah sebesar 0,51%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025, capaian indikator ini adalah sebesar 0,51% dari target tahun sebesar 24%.

Beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan indikator ini adalah:

1. Kurangnya SDM.
2. Informasi pendaftaran untuk menjadi mitra sulit.
3. Jumlah SPPG belum sesuai target

Beberapa rencana tindak lanjut di periode berikutnya untuk mengatasi kendala tersebut agar diantaranya adalah:

1. Penambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
2. Promosi dan edukasi untuk menjadi mitra BGN kepada masyarakat luas.

IKSS 2.2 Persentase Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita yang Mendapatkan Makan Bergizi Gratis

Telah dilakukan penyaluran makan bergizi gratis terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan balita selama TW II. Pada TW II, target penyaluran makan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah sebesar 24% dengan realisasi sebesar 1,25%. Dengan demikian, capaian indikator tersebut adalah sebesar 0,11%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025, capaian indikator ini adalah sebesar 0,11% dari target tahun sebesar 24%.

Beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan indikator ini adalah:

1. Kurangnya SDM.
2. Informasi pendaftaran untuk menjadi mitra sulit.
3. Jumlah SPPG belum sesuai target

Beberapa rencana tindak lanjut di periode berikutnya untuk mengatasi kendala tersebut agar diantaranya adalah:

1. Penambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
2. Promosi dan edukasi untuk menjadi mitra BGN kepada masyarakat luas.

IKSS 2.3 Persentase Kenaikan Status Gizi Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang mengalami kenaikan status gizi dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat yang diukur pada TW II. Pada TW II terdapat kenaikan status gizi sebesar 1,33% dari target 5%. Dengan demikian, capaian indikator tersebut adalah sebesar 0,27%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025, capaian indikator ini adalah sebesar 0,27% dari target tahun sebesar 5%.

Beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan indikator ini adalah:

1. Kurangnya SDM.
2. Informasi pendaftaran untuk menjadi mitra sulit.
3. Jumlah SPPG belum sesuai target.

4. Data belum tersedia/diisi berdasarkan Fa Detail realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional

Beberapa rencana tindak lanjut di periode berikutnya untuk mengatasi kendala tersebut agar diantaranya adalah:

1. Penambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
2. Promosi dan edukasi untuk menjadi mitra BGN kepada masyarakat luas.

3. SS 3: Terwujudnya Literasi Gizi Masyarakat tentang Makan Bergizi secara Optimal

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja Triwulan II			Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%
Terwujudnya Literasi Gizi Masyarakat tentang Makan Bergizi secara Optimal	IKSS 3.1 Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik	50	12,18	24,36	50	12,18	24,36
	IKSS 3.2 Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik	50	1,25	2,50	50	1,25	2,50

IKSS 3.1 Persentase Siswa dan Santri dengan Skor Literasi Gizi Baik

Dalam rangka meningkatkan kesadaran gizi masyarakat sejak usia dini, pengukuran literasi gizi pada siswa dan santri menjadi indikator penting. Indikator ini mengukur sejauh mana peserta didik memahami prinsip-prinsip gizi seimbang, pentingnya pola makan sehat, serta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Literasi gizi yang baik menunjukkan bahwa siswa dan santri telah memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku positif terhadap konsumsi pangan bergizi, aman, dan sesuai kebutuhan tubuh.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berupa kuesioner atau tes literasi gizi yang telah terstandarisasi. Responden (siswa/santri) diberikan sejumlah pertanyaan untuk mengukur pengetahuan dasar gizi, pemahaman tentang pangan sehat, serta perilaku konsumsi yang dianjurkan. Siswa/santri yang

memperoleh skor minimal sesuai kriteria “baik” pada instrumen penilaian dianggap memiliki literasi gizi baik.

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah siswa atau santri dengan skor literasi gizi kategori baik dibandingkan dengan total responden siswa atau santri yang diukur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan survei terstandar menggunakan kuesioner literasi gizi yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku.

$$\text{Persentase Siswa/Santri dengan Skor Literasi Gizi Baik} = \left(\frac{\text{Siswa atau Santri dengan Skor Literasi Gizi Baik}}{\text{Total Siswa atau Santri yang Diukur}} \right) \times 100\%$$

Pada TW II, target siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik adalah sebesar 50% dengan realisasi sebesar 12,18%. Dengan demikian, capaian indikator tersebut adalah sebesar 24,36%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025, capaian indikator ini adalah sebesar 50% dari target tahun sebesar 24,36%.

Beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan indikator ini adalah:

1. Kurangnya SDM.
2. Informasi pendaftaran untuk menjadi mitra sulit.
3. Jumlah SPPG belum sesuai target

Beberapa rencana tindak lanjut di periode berikutnya untuk mengatasi kendala tersebut agar diantaranya adalah:

1. Penambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
2. Promosi dan edukasi untuk menjadi mitra BGN kepada masyarakat luas.

IKSS 3.2 Persentase Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Pengasuh Balita dengan Skor Literasi Gizi Baik

Dalam upaya memastikan pemenuhan gizi yang optimal pada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, literasi gizi para pengasuh menjadi faktor penentu penting. Indikator ini mengukur proporsi individu pada kelompok ini yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan perilaku positif tentang gizi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing fase kehidupan.

Literasi gizi yang baik pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita mencerminkan kemampuan mereka untuk memilih pangan yang bergizi, aman, dan tepat, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak balita yang diasuh. Hal ini mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan yang optimal.

Indikator ini bertujuan memastikan intervensi gizi pada kelompok rentan lebih efektif melalui peningkatan literasi gizi di tingkat rumah tangga. Pengukuran dilakukan melalui penyebaran kuesioner atau tes literasi gizi terstandarisasi yang mencakup aspek pengetahuan tentang gizi seimbang, keamanan pangan, serta praktik pemberian makan pada ibu dan anak. Responden yang mencapai skor minimal kategori “baik” dianggap memiliki literasi gizi yang baik.

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi kategori baik dibandingkan dengan total responden ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita yang diukur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan survei terstandar menggunakan kuesioner literasi gizi yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku.

Persentase Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Pengasuh Balita dengan Skor Literasi Gizi

$$\text{Baik} = \frac{\text{Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Pengasuh Balita dengan Skor Literasi Gizi Baik}}{\text{Total Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Pengasuh Balita yang Diukur}} \times 100\%$$

Pada TW II, target ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik adalah sebesar 50% dengan realisasi sebesar 1,25%. Dengan demikian, capaian indikator tersebut adalah sebesar 2,50%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025, capaian indikator ini adalah sebesar 50% dari target tahun sebesar 2,50%.

Beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan indikator ini adalah:

1. Kurangnya SDM.
2. Informasi pendaftaran untuk menjadi mitra sulit.
3. Jumlah SPPG belum sesuai target

Beberapa rencana tindak lanjut di periode berikutnya untuk mengatasi kendala tersebut agar diantaranya adalah:

1. Penambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
2. Promosi dan edukasi untuk menjadi mitra BGN kepada masyarakat luas.

4. SS 4: Terwujudnya Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat yang Efektif dalam Mendukung Implementasi Pemenuhan Gizi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja Triwulan II			Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%
Terwujudnya Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat yang Efektif dalam Mendukung Implementasi Pemenuhan Gizi Nasional	IKSS 4.1 Persentase kerjasama di bidang pemenuhan gizi nasional yang efektif	85	0	0	85	0	0
	IKSS 4.2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemenuhan gizi nasional	80	0	0	80	0	0

IKSS 4.1 Persentase Kerjasama di Bidang Pemenuhan Gizi Nasional yang Efektif

Pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Kerja Sama di Bidang Pemenuhan Gizi Nasional yang Efektif belum dapat dilaksanakan oleh unit kerja pada periode triwulan II karena belum tersedia perangkat ukur yang terstandarisasi untuk menilai tingkat efektivitas kerja sama dimaksud. Sebagai langkah perbaikan, unit kerja akan menginisiasi penyusunan metodologi dan perangkat pengukuran yang memadai guna memastikan pengukuran kinerja pada indikator ini dapat dilakukan secara valid, reliabel, dan berkesinambungan pada periode pelaporan berikutnya.

IKSS 4.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional

Pengukuran kinerja terhadap indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional belum dapat dilaksanakan oleh unit kerja pada periode triwulan II karena belum tersedia metode dan perangkat ukur yang terstandarisasi untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi tingkat partisipasi secara komprehensif. Sebagai tindak lanjut, unit kerja akan mengembangkan metodologi dan instrumen pengukuran yang sesuai agar pemantauan kinerja pada indikator ini dapat dilakukan secara valid, reliabel, dan berkesinambungan pada periode pelaporan berikutnya.

5. SS 5: Terwujudnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sesuai Standar

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja Triwulan II			Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%
Terwujudnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sesuai Standar	IKSS 5.1 Persentase SPPG satuan pelayanan (dapur) yang sesuai standar	95	23,09	24,31	95	23,09	24,31

IKSS 5.1 Persentase SPPG Satuan Pelayanan (Dapur) yang sesuai Standar

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah SPPG (dapur) yang memenuhi standar dibandingkan dengan jumlah SPPG (dapur) yang telah beroperasi. Pada TW II, jumlah SPPG yang memenuhi standar sebanyak 415 SPPG (dapur) dari total 1.797 SPPG (dapur) yang telah beroperasi. Dengan demikian, realisasi indikator tersebut pada TW II adalah 23,09% dengan persentase capaian sebesar 24,31%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, capaian indikator ini adalah sebesar 24,31% dari target tahun 2025 sebesar 95%.

Beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan indikator ini adalah:

1. Insiden keracunan makanan yang terjadi di beberapa SPPG secara langsung berdampak pada kualitas dan keamanan pelayanan gizi yang diberikan, sehingga menurunkan tingkat kesesuaian SPPG dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Banyak SPPG juga belum sepenuhnya memahami standar yang telah ditetapkan. Belum terlaksananya sosialisasi di seluruh provinsi di Indonesia dan pemantauan yang efektif menyebabkan SPPG kesulitan dalam melaksanakan pemberian Makan Bergizi Gratis yang benar.

Rencana tindak lanjut di periode berikutnya untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya adalah:

1. Telah disusun Pedoman Manajemen Krisis sebagai pedoman untuk penanganan krisis seperti keracunan makanan, kebakaran, gangguan operasi, dan gangguan distribusi.
2. Akan dilaksanakan upaya komprehensif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman SPPG terhadap standar yang berlaku.
3. Memperketat pengawasan terhadap praktik kebersihan dan keamanan pangan guna mencegah terulangnya kasus keracunan makanan.

6. SS 6: Terwujudnya Tata Kelola dan Pemerintahan Badan Gizi Nasional yang Optimal

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja Triwulan II			Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terwujudnya Tata Kelola dan Pemerintahan Badan Gizi Nasional yang Optimal	IKSS 6.1 Indeks RB BGN	N/A	N/A	N/A	76	N/A	N/A

IKSS 6.1 Indeks RB BGN

Indikator ini dihitung pada akhir tahun

B. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 yang terbit pada tanggal 1 Februari 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71.000.000.000.000. Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di TW II, BGN menggunakan anggaran sebanyak Rp 5.004.725.395.450 atau sebesar 7.05% dari total anggaran yang diberikan. Informasi lebih detail mengenai pagu dan realisasi anggaran BGN tahun 2025 TW II dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi Anggaran BGN menurut Program Tahun 2025

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
128.01.DT Program Pemenuhan Gizi Nasional	63.575.020.442.000	3.738.051.435.767	5,88%
128.01.WA Program Dukungan Manajemen	7.424.979.558.000	1.266.673.959.683	17,06%
Total	71.000.000.000.000	5.004.725.395.450	7,05%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) TW II tahun 2025 antara lain:

1. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, BGN telah melaksanakan 5 (lima) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kegiatan.
2. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang diukur, 2 (dua) indikator kinerja memperoleh capaian sebesar 100%, sedangkan 8 (delapan) indikator kinerja memperoleh capaian di bawah 100%.
3. Realisasi anggaran BGN sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.004.725.395.450 atau 7.05% dari total pagu Rp 71.000.000.000.000.

B. Permasalahan dan Saran

Berdasarkan hasil capaian kegiatan yang telah dilakukan oleh BGN pada Triwulan II Tahun 2025, beberapa permasalahan yang dialami antara lain:

1. Kurangnya SDM.
2. Informasi pendaftaran untuk menjadi mitra sulit.
3. Jumlah SPPG belum sesuai target.
4. Data belum tersedia/diisi berdasarkan Fa Detail realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional.
5. Insiden keracunan makanan yang terjadi di beberapa SPPG secara langsung berdampak pada kualitas dan keamanan pelayanan gizi yang diberikan, sehingga menurunkan tingkat kesesuaian SPPG dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Banyak SPPG juga belum sepenuhnya memahami standar yang telah ditetapkan. Belum terlaksananya sosialisasi di seluruh provinsi di Indonesia dan pemantauan yang efektif menyebabkan SPPG kesulitan dalam melaksanakan pemberian Makan Bergizi Gratis yang benar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Penambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
2. Promosi dan edukasi untuk menjadi mitra BGN kepada masyarakat luas.

3. Telah disusun Pedoman Manajemen Krisis sebagai pedoman untuk penanganan krisis seperti keracunan makanan, kebakaran, gangguan operasi, dan gangguan distribusi.
4. Akan dilaksanakan upaya komprehensif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman SPPG terhadap standar yang berlaku.
5. Memperketat pengawasan terhadap praktik kebersihan dan keamanan pangan guna mencegah terulangnya kasus keracunan makanan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN GIZI NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dadan Hindayana
Jabatan : Kepala Badan Gizi Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN GIZI NASIONAL

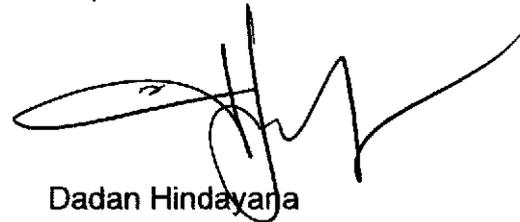
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Sistem dan Tata Kelola pemenuhan gizi nasional yang efektif (mekanisme, prosedur, dan standar tata kelola pemenuhan gizi)	Persentase pemenuhan kebijakan/peraturan/pedoman di bidang pemenuhan gizi nasional	85%
		Jumlah kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional yang diterapkan	5
		Persentase komplain yang ditindaklanjuti	100%
2	Terwujudnya penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif	Persentase siswa/santri yang mendapatkan makan bergizi gratis	24%
		Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mendapatkan makan bergizi gratis	11%
		Persentase Kenaikan Status Gizi Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis	5%
3	Terwujudnya literasi gizi masyarakat tentang makan bergizi secara optimal	Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik	50
		Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita yang dengan skor literasi gizi baik	50
4	Terwujudnya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional	Persentase kerjasama di bidang pemenuhan gizi nasional yang efektif	85%
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemenuhan gizi nasional	80
5	Terwujudnya satuan pelayanan pemenuhan gizi sesuai standar	Persentase SPPG satuan pelayanan (dapur) yang sesuai standar	95
6	Terwujudnya tata kelola dan pemerintahan Badan Gizi Nasional yang optimal	Indeks RB BGN	76

Alokasi anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2025 sebesar Rp 71.000.000.000.000 (Tujuh Puluh Satu Triliun Rupiah).

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Pemenuhan Gizi Nasional	63.575.020.442.000
2	Dukungan Manajemen	7.424.979.558.000

Jakarta, Januari 2025

Kepala Badan Gizi Nasional

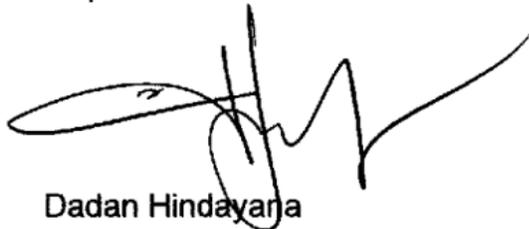


Dadan Hindayana

NO.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional	Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemenuhan gizi nasional	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
5	Terwujudnya satuan pelayanan pemenuhan gizi sesuai standar	Persentase SPPG satuan pelayanan (dapur) yang sesuai standar	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	190.695.000.000
6	Terwujudnya tata kelola dan pemerintahan Badan Gizi Nasional yang optimal	Indeks RB BGN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	7.400.979.558.000
Total														71.000.000.000.000	

Jakarta, Januari 2025

Kepala Badan Gizi Nasional



Dadan Hindayana



BADAN GIZI NASIONAL

2025



www.bgn.go.id



halo@bgn.co.id



0811-1000-8008